

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, H. (2009). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. PT Refika Aditama.
- _____. (2008). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Anonim. (2006). *Himpunan Etika Profesi: Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*. Pustaka Yustisia.
- Asshiddiqie, J., & Ali, S. M. (2012). *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (2nd ed.). Konstitusi Press.
- Budiono, H. (2006). *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (3rd ed.). Pusat Bahasa, Balai Pustaka.
- Dja'is, M., & Koosmargono, R. M. J. (2008). *Membaca dan Mengerti HIR*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikatan Notaris Indonesia. (2005). *Kode Etik Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I, 27 Januari 2005*, Bandung.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Gaung Persada.
- Kanter, E. Y. (2001). *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Religius*. Stora Grafika.
- Koesoemawati, I., & Rijan, Y. (2009). *Ke Notaris: Raih Asa Sukses*. Jakarta.
- Nico. (2003). *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Center for Documentation and Studies of Business Law.
- Notodisorjo, S. R. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)* (2nd ed.). Raja Grafindo Persada.
- Notohamidjojo, O. (1975). *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*. Gunung Mulia.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2008). *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. PT Gramedia Pustaka.

- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Tedjosaputro, L. (2003). *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Aneka Ilmu.
- Tobing, L. G. H. S. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga.
- Tunggal Setia, H. (2006). *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Harvarindo.
- Winata, F. H. (2003). *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*.
- B. Jurnal / Tesis**
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press.
- Ahmad, R., & Iftitah, A. (2018). Bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam pelaksanaan jabatan notaris. *SUPREMASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 8(2), 1-12.
- Aganita, D. (2020). Keterlibatan notaris dalam pemberantasan money laundering berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 dikaitkan dengan asas kerahasiaan terbatas. *LEX Renaissance*, 5(1), 14-22.
- Edrick, K. (2021). Akibat hukum akta notaris yang dibuat berdasarkan surat atau dokumen dari para pihak yang diketahui palsu setelah akta dibuat. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(1), 13-25.
- Fadli, M. B. (2013). *Implikasi Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta yang Dibuatnya* (Tesis, Universitas Hasanuddin).
- I Made, D. S., Ayu, I. P. W., & Ketut, N. S. A. (2020). Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta otentik yang didasari surat palsu. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 72-80.
- McDonell, R. (2015). Money laundering methodologies and international and regional countermeasures. In H. Amrani (Ed.), *Hukum Pidana Pencucian Uang* (pp. 45-60). UII Press.
- Prananda, V. O., & Anand, G. (2020). Perlindungan hukum terhadap notaris atas pembuatan akta oleh penghadap yang dinyatakan palsu: Analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 385 K/PID/2006. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 5(1), 35-46.

C. Peraturan Perundang - Undangan

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.*

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.*

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.*

Peraturan Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

D. Internet

Hukumonline. (n.d.). *Akta notaris sebagai akta otentik.* Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/aktanotarissbagaiaktaotentik/>

Wikipedia. (2024, September 20). *Kode etik profesi.* Diakses dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/kode_etik_profesi

Scribd. (2024, November 7). *Makalah Notaris.* Diakses dari <http://id.scribd.com/doc/94665321/makalah-notaris>

GuruPendidikan. (2024, Maret 23). *Pengertian profesi.* Diakses dari <http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-profesi/>

Notary Hadi. (2024, Oktober 15). *Kode Etik Notaris.* Diakses dari <http://notaryhadi.wordpress.com/category/kode-etik-notaris/>